

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdurrahman dan Riduan Syarani, “*Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*” (Alumni: Bandung, 1978).
- Idris Ramulyo, “*Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*” (Jakarta: Ind.Hill, 2005).
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, “*Teori Hans Kelsen tentang Hukum*” (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
- Jimly Asshiddiqie, “*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- M.Yahya Harahap, “*Hukum Perkawinan Nasional*” (Medan: CV Zahir Trading Co, 1975).
- Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum Edisi Revisi,*” Cet Ke-8 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017).
- Soerjono Soekanto,. Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet-8 (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2018).
- Subekti, “*Pokok-Pokok Hukum Perdata*” (Jakarta: PT Intermedia, 1970).
- Titik Triwulan Tutik, “*Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*” (Jakarta: Presentasi Pustaka, 2006).
- Wirjono Prodjodikoro, “*Hukum Perkawinan Indonesia*” (Bandung: Sumur, 1974).
- Zaeni Asyhadie, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, Israfil, “*Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*” (Depok: Rajawali Press, 2020).
- Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

## JURNAL

Ali Anwar, Aan Nasrullah, dan Juni Iswanto, Peran Kantor Urusan Agama dalam Potimalisasi Pengelolaan Wakaf, *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol.4, No.2, (November, 2024), <https://lptnunganjuk.com/ojs/index.php/kartika/article/view/47/77>.

Andhika Santoso, Raihan, Elan Jaelani, dan Utang Rosidin, “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol.1, No.4, (Desember, 2023), <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i3.1385>.

Artanti Fitria Hassya Andrianata, Elly Nurlaili, Kasmawati, “Pembatalan Perkawinan: Analisa Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia,” *Momentum: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, Vol.12, No.1 (Mei 1, 2023), dikutip dari <https://ejournal.unismar.ac.id/index.php/momentum/article/view/64>.

Asfita Marina Palupi, Dian Septiandani, dan Efi Yulistyowati, “Implementasi Prinsip Mempersulit Perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Semarang,” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, Vol.5, No.1, (Juli, 2022), <https://doi.org/10.55577/jhei.v5i1.71>.

Fedhli Faisal, H.Faisal, dan Amin Songgirin, “Hak Harta Bersama dan Waris Janda Dari Perkawinan Poligami Yang Tercatat Tanpa Izin Dari Pengadilan Agama,” *Unes Law Review*, Vol.7, No.3, (Maret, 2025), <https://doi.org/10.31933/0faz9b75>.

Fitri Sri Suryaningsih, dan Amal Hayati, “Peran dan Kedudukan KUA Dalam Pengajuan Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Idenitas (Putusan 2856/Pdt.g/2022/PA. Mdn),” *Al Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Hukum*, Vol.5, No.1, (November, 2023), <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2490>.

Jenner Damanik, “Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas,” *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, Vol. 5, No.2 (Februari, 2022), <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11322>.

Mohammad Irvan Fahrizal Ginintu, Nur Mohammad Kasim, dan Julius T. Madjo, “Peran KUA dalam Menanggulangi Perkawinan Tidak Tercatat (Nikah Siri) di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo,” *Deposisi: Jurnal Publikas Ilmu Hukum*, Vol.2, No.1, (Maret, 2024): 305. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i1>.

Najmah Jaman, “Implications Of Polygamy Practices On Positive Law In Indonesia”, *Prophetic Law Review*, Vol. 2, No.1 (June 30, 2020), <https://doi.org/10.20885/PLR.vol2.iss1.art2>.

Nurfadilah Fajri Hurriyah, “Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galasong Utara Kabupaten Takalar,” *Jurnal Algoritma*, Makassar: Universitas Negeri Makassar, Vol.1, No.1, (2018).

Prilia Ayuningtyas dan Prahasti Suyaman, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Setelah Kematian Suami Terhadap Status Perkawinan Dan Hak Waris,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol.3, No.3, (Juli, 2025), <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1648>.

Siti Ramlah, Rahmi Hayati, "Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Web Dalam Pencatatan Nikah Di Kantor Agama Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong," *Jurnal Mekanisme Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, Vol.7, No.2, (Oktober, 2024), <https://doi.org/10.35722/japb.v7i2.1123>.

Sri Hartati, "Peran KUA Dalam Pelaksanaan Pernikahan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, No.1, (Februari, 2025), <https://doi.org/10.29303/prlw.v5i1.6614>.

Tami Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Pranata Hukum*, Vol. 8, No.2 (Juli, 2013).

Yustika Khairati, Agus Sya'bani Arian, dan Mahdalina, "Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pencatatan Nikah Berbasis Online Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan," *Jurnal Pelayanan Publik*, Vol.1, No.2, (2024).

## **ARTIKEL ILMIAH**

A. Hamid S. Attamimi, "*Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I—Pelita IV*," Disertasi, (Universitas Indonesia, 1990).

Anggi Gustriana Mawaddah Siregar, Yunanto, dan Rahandy Rizki Prananda, "*Tinjauan Yuridis atas Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pembatalan*

*Perkawinan Yang Diajukan Oleh Istri Pertama Terhadap Perkawinan Suami Yang Kedua Kalinya Setelah Putusnya Perkawinan Akibat Kematian (Studi Kasus Putusan No.438/Pdt.G/2021/Pa.Llk),” Skripsi, (Universitas Diponegoro, 2022).*

Anis Fauziah, *“Penolakan Permohonan Pembatalan Perkawinan Sebab Manipulasi Identitas (Studi Kasus di Pengadilan Agama Metro Terhadap Perkara Nomor 0402/PDT.G/2016/PA.Mt Tentang Pembatalan Nikah),”* (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2024), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/9141/1/SKRIPSI%20ANIS%20FAUZIYAH%20-%201902011006%20-%20AHS.pdf>.

Ester Palmina Marbun, Herni Widanarti, dan Muhyidin, *“Implikasi Yuridis Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Persetujuan Poligami Serta Penetapan Pengadilan Agama Setelah Putusnya Perkawinan Akibat Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/Pa.Tse),”* Skripsi, (Universitas Diponegoro, 2025).

Irwan Adi Cahyadi, Tunggul Anshari, dan Dhia Al Uyun, *“Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif Indonesia,”* (Universitas Brawijaya, 2014).

Muhammad Muzni, *“Layanan Haji KUA, Kepala KUA Weapo Verifikasi Data Calon Jemaah Haji Sebelum Terbitkan Rekomendasi Pendaftaran,”* Maluku.Kemenag, (01 Juli 2025), <https://maluku.kemenag.go.id/artikel/layanan-haji-kua-kepala-kua-waeapo->

verifikasi-data-calon-jemaah-haji-sebelum-terbitkan-rekomendasi-  
pendaftaran.

Nafiatul Munawaroh, “*Mengenal Frasa Demi Hukum dan Batal Demi Hukum,*”  
(Januari, 2023), [https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-frasa-demi-  
hukum-dan-batal-demi-hukum-lt4fff97aad74a5/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-frasa-demi-hukum-dan-batal-demi-hukum-lt4fff97aad74a5/).

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, “*Pernikahan dalam Islam*” *Menikahlah Untuk  
Menyempurnakan Imanmu,*” (Februari 4, 2022), [https://pusatbisnis.uin-  
suka.ac.id/id/liputan/detail/1478/contact-us.html](https://pusatbisnis.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/1478/contact-us.html).

Willa Wahyuni, “*Pembatalan Perkawinan dalam Hukum,*” *Hukum Online,* (1 Juli  
2022), [https://www.hukumonline.com/berita/a/pembatalan-perkawinan-  
dalam-hukum-lt62be3a7cc38e5/](https://www.hukumonline.com/berita/a/pembatalan-perkawinan-dalam-hukum-lt62be3a7cc38e5/).

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

*Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum  
Islam.

Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi  
Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 dan 7  
Tahun 2023 tentang Pencatatan Nikah, Rujuk, dan Cerai serta Penerbitan  
Kutipan Akta Nikah, Akta Rujuk, dan Akta Cerai.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Aparatur Sipil Negara.